

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam gambaran umum menjelaskan beberapa hal yang dianggap penting untuk :

1. Tugas Pokok Bapedalda

Tugas Pokok Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan. (Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008).

2. Fungsi Bapedalda

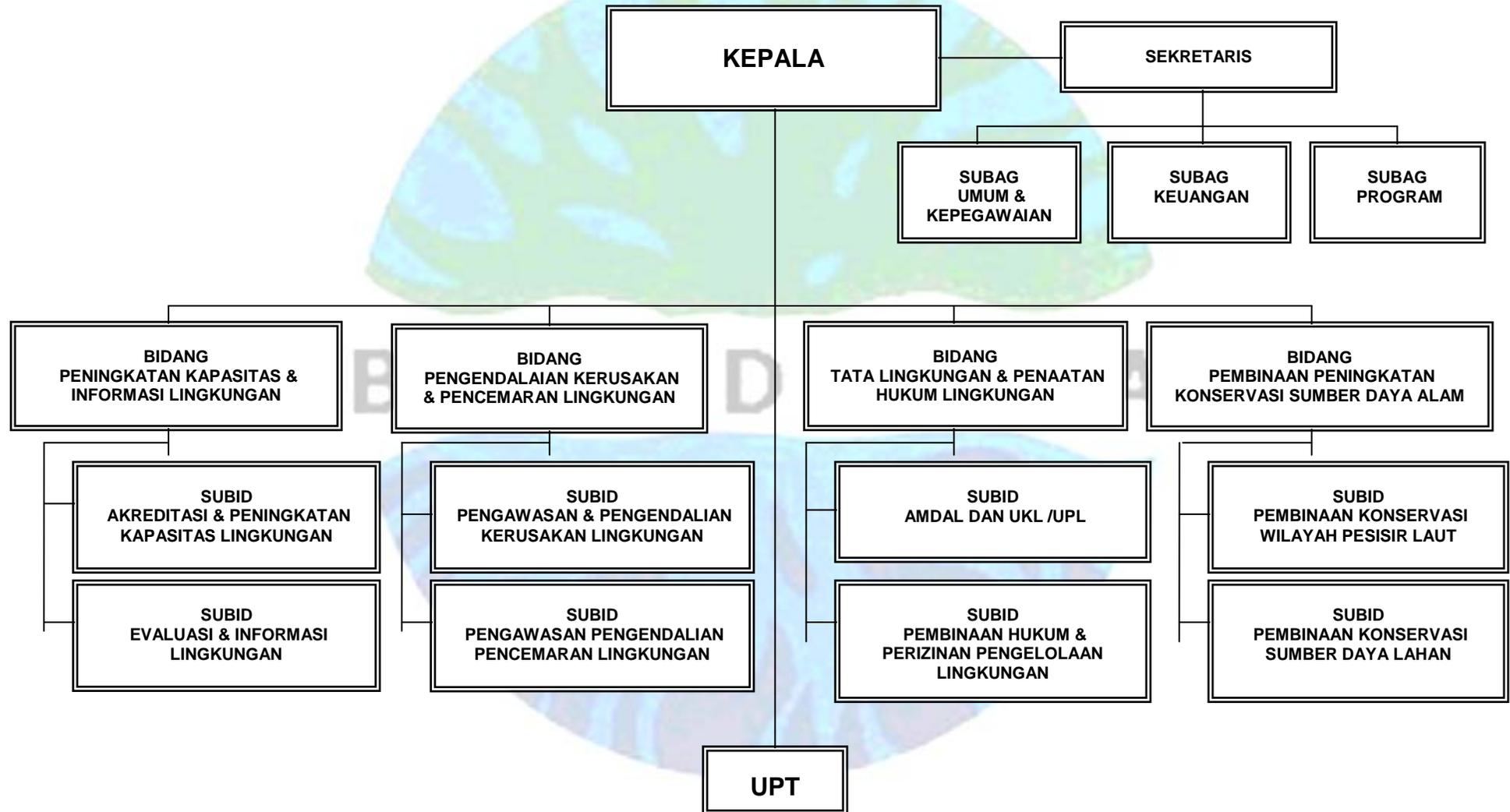
Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Propinsi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat, yaitu terdiri dari : (bagan struktur organisasi terlampir)



STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALDA PROPINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN : PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008





2.2 Sumber Daya SKPD

Kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar telah mengalami peningkatan dimana terdapat 6 Kabupaten/Kota berbentuk Badan dan 1 Kabupaten/Kota berbentuk Dinas serta 12 Kabupaten/Kota berbentuk Kantor. Sementara Bapedalda Provinsi Sumatera Barat kelembagaannya berbentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan 4 bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dan Informasi Lingkungan, Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Dan Bidang Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam.

Adapun Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:

- a. Melahirkan produk hukum yang diharapkan berdampak pada perlindungan lingkungan dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
- b. Pendanaan dan sarana prasarana yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil lingkungan hidup.

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat pada tahun saat ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 81 personil dengan beragam latar pendidikan yaitu S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 43 orang, DIII/IV sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 27 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pertambahan Penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi over capacity yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada Provinsi, Kab/Kota yang lebih jauh dijabarkan dalam PP 38 tahun 2007, dimana urusan Pemerintah dibagi dalam bentuk urusan yang berupa Obligasi (Urusan yang tidak dilimpahkan) dan Concurent (Urusan bersama). Dalam urusan Concurent, urusan Wajib Provinsi salah satunya adalah Urusan Wajib tentang Lingkungan Hidup (yang menduduki posisi ketiga).



Memperoleh lingkungan yang sehat dan memadai serta mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kondisi lingkungannya merupakan hak masyarakat sebagaimana yang diatur Undang undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat, berusaha untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat dengan upaya memberikan pelayanan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup telah ditetapkan standar minimal yang mesti dipenuhi melalui Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang LH Daerah Provinsi yang penekanannya pada : ***(a) Informasi Status Mutu Air, (b) Informasi Status Mutu Udara Ambien dan (c) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.*** Adapun untuk kabupaten dan Kota maka penekan pelayanan bidang LH adalah pada upaya Pencegahan pencemaran lingkungan dari Sumbernya (parsial), dan Kabupaten/Kota wajib memberikan/menyediakan informasi tentang adanya kasus kasus yang berkenaan dengan perusakan lingkungan/lahan.

Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang banyak, yang tidak mungkin semuanya dapat ditetapkan sebagai target. Apalagi dengan keterbatasan dana dan SDM maka perlu penetapan skala prioritas tetapi tetap mewakili permasalahan dan kualitas lingkungan Sumatera Barat. Demikian pula yang menyangkut pelayanan Status Mutu Udara Ambien dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu perlu disusun rencana pencapaian SPM agar tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktunya.

Selain itu, tahun 2010 merupakan tahun terakhir dari pelaksana RPJMD 2006-2010. Selanjutnya akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) tahun 2011-2015. Diharapkan dalam RPJMD tersebut dapat



mengakomodir SPM-LH dan diimplementasikan pada program dan kegiatan tahunan (RKT).

Disamping didukung oleh dana dan sistem informasi agar tercapai sesuai dengan target yang dicapai perlu didukung dengan pengorganisasian SPM disetiap bidang pelayanan yang akan diinformasikan, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air.

Pelayanan informasi status mutu air dilaksanakan dan berkoordinasi secara bersama antara Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan instansi LH kab/kota terkait.

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien.

Pelayanan informasi status mutu udara ambien dilaksanakan dan dibawah koordinasi Bidang Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dengan melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan instansi LH kab/kota terkait.

3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dan dibawah koordinasi Bidang Tata Lingkungan dan Penataatan Hukum Lingkungan dengan melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan instansi LH kab/kota terkait.

Sedangkan pengorganisasian sistem informasi yang akan dipublikasikan ke masyarakat dibawah koordinasi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi dengan mengacu kepada Permen Lingkungan Hidup No 19 dan 20 Tahun 2009, bahwa target pencapaian SPM dimasing-masing provinsi dan kab/kota terealisasi sampai tahun 2013 mengacu kepada kriteria yang ditetapkan pada RP-SPM dari masing-masing pelayanan dan kondisi dari pemantauan kualitas air, kualitas udara dan penyelesaian kasus lingkungan yang dilaksanakan selama ini maka target pencapaian dari masing-masing pelayanan yang akan diinformasikan sebagaimana dibawah ini :



1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

81 sungai lintas kab/kota yang berada pada wilayah administrasi Sumatera Barat dan baru ditetapkan klasifikasi mutu airnya 8 (delapan) sungai. Penetapan klasifikasi Sungai tersebut didasari kepada apakah sungai tersebut lintas kab/kota atau tidak dan mengacu kepada PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yakni sungai yang lintas kab/kota menjadi kewenangan Provinsi sedangkan sungai yang berada pada parsial kab/kota menjadi kewenangan kab/kota.

Dari 8 (delapan) sungai yang telah ditetapkan klasifikasinya tersebut, yang menjadi target pencapaian SPM sebanyak 6 (enam) sungai, yaitu : Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Agam, Batang Masang Gadang dan Sungai Batang Anai. Penetapan sungai yang menjadi target RP-SPM tersebut didasari atas kriteria sebagai berikut :

- a. Sungai yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber PDAM
- b. Sungai melintasi areal perkebunan/pertanian.
- c. Sungai melintasi wilayah perkotaan
- d. Kegiatan pertambangan/industri baik yang berada pada badan sungai atau daerah aliran sungai.
- e. Sungai yang telah ditetapkan klasifikasi mutu air sungainya

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Informasi status mutu udara ambien 19 kab/kota di Sumatera Barat merupakan rencana pencapaian informasi status mutu udara yang akan dipublikasikan ke masyarakat, sedangkan kriteria informasi status mutu udara ambien yang akan disampaikan adalah :

- a. Kawasan/Lokasi Pemantauan :
 - Kawasan Padat Lalu Lintas;
 - Kawasan Pemukiman;
 - Kawasan Industri;
 - Kawasan yang terkena imbas kebakaran hutan.
- b. Jumlah Parameter Pemantauan :
 - Kota Padang 4 parameter tiap kawasan;
 - Kab/kota lainnya 3 parameter tiap kawasan.



3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Target Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan kepada jumlah pengaduan yang masuk ke pos pengaduan. Kriteria penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diantaranya :

- a. Usaha/kegiatan/dampak pencemaran dan/atau kerusakan lintas kab/kota;
- b. Dokumen lingkungan (AMDAL/DPPL/DPL/UKL-UPL) yang dibahas di Provinsi;
- c. Izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
- d. Wilayah 4 – 12 mil;

Apabila pengaduan masuk ke pos pengaduan provinsi sedangkan kab/kota tempat masyarakat yang mengadukan belum memiliki pos pengaduan maka tindak lanjutnya menjadi target RP-SPM provinsi.

B A P E D A L D A



Tabel T-IV.C-2

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Tata Lingkungan dan Penuaan Hukum Lingkungan				30%	40%	60%	80%	100%	30%					30%				
	Program Tata Lingkungan dan Penuaan Hukum Lingkungan				30%	40%	60%	80%	100%	30%					30%				
	Jumlah kab./kota peserta sosialisasi KLHS				19					19					19				
	Jumlah Instansi LH Kab./Kota yang menjadi objek pembinaan dan penegakan hukum lingkungan serta perizinan				8	10	10	10	10	8					8				
	Jumlah pemilik kegiatan yang menjadi objek pembinaan dan penegakan hukum lingkungan serta perizinan				3	5	5	5	5	3					3				
	Jumlah kasus yang terselesaikan dari kasus yang masuk	5			5	5	5	5	5	5					5				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perda tentang perlindungan dan pengelolaan LH				1 buah draft Perda	1 buah Perda				1 buah draft Perda					1 buah draft Perda				
	Peraturan Gubernur mengenai Skala Kualitas Lingkungan				1 (satu) draft pergub					1 (satu) draft pergub					1 (satu) draft pergub				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				30%	40%	60%	80%	100%	30%					30%				
	- Jumlah Keputusan Gubernur dan/atau Ka. Bapedalda				8	8	8	8	8	8					8				
	- Jumlah kab/ kota objek inventarisasi				4	4	4	4	4	4					4				
	- Jumlah Kab/Kota yang dibina				4	4	4	4	4	4					4				
	- Jumlah kegiatan yang dipantau implementasi AMDALnya				3	3	3	3	3	3					3				
	Jumlah instansi lingkungan hidup di Kab/Kota yang terbina untuk melakukan wasdal kerusakan lingkungan				7	6	(Tentatif - pelaksanaa n Wasdal dari hasil evaluasi tahun sebelumnya)			7					7				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah kegiatan yang terawasi dan terkendalikan dampak kerusakan lingkungan hidupnya				2 keg. + 4 uji petik	3 keg. + 6 uji petik					2 keg. + 4 uji petik				2 keg. + 4 uji petik				
	Meningkatnya kinerja wasdal pencemaran lingkungan yg dilakukan Institusi LH Kab/Kota				7 Inst.LH Kab/Kota	7 Inst.LH Kab/Kota Uji petik 5 keg	Uji petik 10 keg	Uji petik 10 keg	Uji petik 10 keg	7 Inst.LH Kab/Kota					7 Inst.LH Kab/Kota				
	Meningkatnya pemahaman personil Institusi LH Kab/Kota serta Pengelola Rumah Sakit di Prov. Sumbar dalam pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit					30 orang													
	Meningkatnya pemahaman personil Institusi LH Kab/Kota & Pengelola Pabrik Kelapa Sawit di Prov. Sumbar dlm pengelolaan lingkungan PKS						50 orang												
	Meningkatnya pemahaman Inst. LH & Pengelola Hotel di Prov.							50 orang											



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sumbar dalam pengelolaan lingkungan hotel																		
	Meningkatnya pemahaman Pengelola Industri Kecil & Menengah di Prov. Sumbar dalam pengelolaan lingkungan hidup								50 orang										
	Data status kualitas lingkungan hidup prov. Sumbar (SLHD)				Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar	Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar	Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar	Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar	Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar	Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar					Data status kualitas lingkungan hidup Prov. Sumbar				
	Kondisi kualitas lingkungan hidup dan peraturan bidang LH prov. Sumbar				Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan sawit secara digitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan sawit secara digitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan dan lingkungan kegiatan secara terintegrasi dengan kab/kota dan publikasi lingkungan di media	Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan dan lingkungan kegiatan secara terintegrasi dengan kab/kota dan publikasi lingkungan di media	Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan dan lingkungan kegiatan secara terintegrasi dengan kab/kota dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah) dan	Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan dan lingkungan kegiatan secara terintegrasi dengan kab/kota dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah) dan					Terdata dan Terinformasinya kondisi kualitas lingkungan perusahaan sawit secara digitalisasi di Provinsi Sumatera Barat				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							cetak (koran, majalah) dan elektronik (Tv, radio dan website)	kab/kota dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah) dan elektronik (Tv, radio dan website)	elektronik (Tv, radio dan website)										
	Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambien di 19 Kab/Kota	19			9	9	12	15	19	9					9				
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				30%	40%	60%	80%	100%	30%					30%				
	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat di disekitar lokasi pesisir laut				3	-	4	5	6	3					3				
	Data penetapan status mutu air dan daya tampung air	5			1	2	3	4	5	1					1				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	sungai																		
	Jumlah laboratorium yang operasionalnya sesuai dengan instansi LH Kab/Kota				Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 8 kab/kota dan 1 yang memenuhi syarat	Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 10 kab/kota dan 2 yang memenuhi syarat	Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 12 kab/kota dan 3 yang memenuhi syarat	Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 16 kab/kota dan 4 yang memenuhi syarat	Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 19 kab/kota dan 5 yang memenuhi syarat	Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 8 kab/kota dan 1 yang memenuhi syarat					Pembinaan Pelayanan operasional lab lingkungan kab/kota sebanyak 8 kab/kota dan 1 yang memenuhi syarat				
	Sekolah yang bersih dan berbudaya lingkungan				20	22	25	30	35	20					20				
	Jumlah Kota yang berhasil mendapat Predikat Adipura				8	10	12	14	16	8					8				
	Jumlah analisa sample pada 4 danau				20%	20%	30%			20%					20%				
	Jumlah Stakeholder, masyarakat dan dunia usaha yang diberikan penyuluhan pada 3 Kabupaten				20%	20%	20.6%			20%					20%				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Individu Masyarakat dan Kelompok Masy. yang Peduli Lingkungan				8	8	8	8	8	8					8				
	Jumlah Nagari/Kelurahan dan masyarakat di Sumatera Barat yang sadar Lingkungan				3	3	3	3	3	3					3				
	Jumlah Pelaksanaan koordinasi perlindungan kawasan Lembah Anai.				6	6	6	6	6	6					6				
	Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat dalam pengelolaan SDA dan penataan Peraturan Pemerintah di bidang konservasi SDA.				10%	10%	18%			10%					10%				
	Jumlah Daerah yang dikoordinir dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan jumlah masyarakat yang mendapatkan				4	4	4	4	1 provinsi 3 Kab/kota	4					4				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	sosialisasi tentang Keaneekaragam Hayati																		
	Jumlah Kota yang berhasil mendapat Predikat Adipura				5	5	6	8	8	5					5				
	Terlaksananya koordinasi dan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau				30%	30%	1 kajian dokumen lingkungan	60%	70%	30%					30%				
	Jumlah Individu Masyarakat dan Kelompok Masy. yang Peduli Lingkungan				4	4	4	4	4	4					4				
	Jumlah Nagari/Kelurahan dan masyarakat di Sumatera Barat yang sadar Lingkungan				3	3	3	3	3	3					3				
	Terlaksananya koordinasi perlindungan kawasan Lembah Anai.				75%	80%	85%	90%	95%	75%					75%				
	Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Kab/Kota di				40%	50%	70%	85%	100%	40%					40%				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sumatera Barat dalam pengelolaan SDA dan penataan Peraturan Pemerintah di bidang konservasi SDA.																		
	Sinkronisasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kab/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Terlaksana pada 19 Kab/Kota di Sumatera Barat					Terlaksana pada 19 Kab/Kota di Sumatera Barat									
	Teralaksananya peringatan HLH Se-Dunia Tingkat Provinsi Sumatera Barat				85%	90%	100%	100%	100%	85%					85%				
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan kegiatan di sepanjang sungai sehingga kualitas air sungai juga meningkat				1	2	3	3	4	1					1				
	Meningkatnya persentase perusahaan yg telah memenuhi aturan pengelolaan LH				10	14	15	20	20	10					10				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kinerja wasdal Limbah B3 yang dilakukan Institusi LH Kab/Kota				7 Kab/Kota	7 Inst.LH Kab/Kota Uji petik 5 keg	5 Inst.LH Kab/Kota Uji petik 10 keg	Uji petik 15 keg	Uji petik 15 keg	7 Inst.LH Kab/Kota					7 Inst.LH Kab/Kota				
	Meningkatnya pemahaman Institusi Pengelola LH Kab/Kota & Pemilik Kegiatan yg menghasilkan limbah B3					30 orang													
	Jumlah Kab/Kota dan perusahaan yang memanfaatkan/melaksanakan CSR				2	4	6	8	10	2					2				
	Koordinasi, pengumpulan data sumber permasalahan lingkungan dan penyelesaian permasalahan DAS Batanghari segmen Sumbar				25%	50%	70%	80%	100%	25%					25%				
	Jumlah kelembagaan dan SDM yang terlatih pada instansi LH provinsi serta terevaluasi SPM bidang lingkungan sesuai dengan				25%	50%	70%	80%	100%	25%					25%				



RENSTRA 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	petunjuk teknis pencapaian SPM																		
	Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim				30%	40%	60%	80%	100%	30%					30%				
	Jumlah Kab/Kota yang memakai bahan perusak ozon pada bengkel AC dan Industri				10	12	14	18	20	10					10				

B A P E D A L D A





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini :

1. Kekuatan (*strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2011-2015, serta Renstra 2011-2015 dari Gubernur terpilih;
- c. Sumber Daya Manusia meliputi kompetensi, profesionalisme dan jumlah personil;
- d. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya;
- e. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti Properlike, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Prolasih, Menuju Indonesia Hijau (MIH), dan Keanekaragaman Hayati;
- f. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ekolabel.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Sarana dan prasarana kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;



- c. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif;
- d. Kapasitas kerja diantaranya sistim akuntabilitas publik, sosial marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;
- e. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang (*opportunities*)

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global;
- b. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- e. Penerapan otonomi daerah.

4. Tantangan (*threats*)

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan;
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah;
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;



- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.

